

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
DAN LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH**

(Studi kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2008-2015)

Kendy Rama Nuzulistyan ¹, Agus Supriyanto ², Patricia Dhiana Paramita ³

**¹ Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Pandananaran Semarang**

**² ³ Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Pandaran Semarang**

ABSTRACT

The purpose of this study to determine whether or not the influence of local taxes, levies, wealth management outcomes separated areas and other areas of legitimate revenue to local revenue. research central java province is done in official income and asset management of the province central java. This method in this study is to collect data obtained from the documentation that comes from revenue offices and asset management areas of central java province in semarang. sample in this study is the amount of local taxes, levies, wealth management outcomes separated areas of engineering data analysis used is multiple linier regression.

The data analysis technique used to test hypothesis multiple linear regression analysis which includes f test, t test and coefficient determination. all data processed using SPSS 16.0 program were first tested using classic assumption test including normality test, multicollinearity test, heteroskedastiditas test, and autocorrelation test

F test results indicate that the regional taxes, levies, wealth management outcomes separated areas and other legitimate income areas simultaneously affect the revenue of the province of Central Java. This is because a significant level in the ANOVA of $0.000 < 0.05$ while from the calculation of the t test each variable independentnya shows that the local tax, wealth management outcomes separated areas and others local revenue legitimate significant impact on revenue period in 2008-2015 and levies no effect on revenue period 2008-2015

Keywords: local taxes, levies, wealth management outcomes separated areas other legitimate local revenue and local revenue.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Metode dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berasal dari Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari tahun 2008-2015, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 data. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah analisis regresi linear berganda yang mencakup Uji F, Uji T, dan Koefisien Determinasi. Semua data diolah dengan menggunakan Program SPSS 16.0 yang terlebih dahulu diuji menggunakan Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi

Hasil Uji F menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena tingkat signifikansi pada anova sebesar $0,000 < 0,05$. Sedangkan dari hasil perhitungan Uji T masing-masing variabel independennya menunjukkan bahwa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2008-2015 dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2008-2015.

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah adalah suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, diperlukan proses pembelajaran bagi setiap daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing di daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan (Suwarno dan Suhartiningih, 2008).

Dari banyak komponen pajak daerah yang dikelola Kota Semarang yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain- Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah. Dalam penerimaan pendapatan daerah, pemerintah menetapkan suatu target realisasi sebagai acuan untuk pencapaian peningkatan penerimaan yang harus dicapai. Jika penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan maka akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan jika acuan target realisasi penerimaan yang telah ditentukan tidak tercapai maka perlu dilakukan evaluasi agar target realisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang bisa mencapai atau melebihi target tersebut. Adapun capaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat tabel 1 Berikut ini:

Tabel.1.1

Capaian dan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2015

Keterangan	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Pajak Daerah	2008	2,952,500,000,000.00	3,068,207,704,890.00	103,92%
	2009	2,939,766,264,000.00	3,236,779,048,381.00	110,10%
	2010	3,076,000,000,000.00	3,893,692,225,703.00	126,58%
	2011	4,263,000,000,000.00	4,599,046,986,897.00	107,88%
	2012	5,273,190,000,000.00	5,590,597,156,499.00	106,02%
	2013	6,018,189,560,000.00	6,729,438,461,983.00	111,82%
	2014	7,819,097,466,000.00	8,213,117,977,920.00	105,04%
	2015	10,512,318,175,000.00	9,090,677,397,011.00	86,48%
Keterangan	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Retribusi Daerah	2008	341,941,034,000.00	345,964,779,407.00	101,18%
	2009	132,926,457,000.00	130,604,918,877.00	98,25%
	2010	122,932,115,000.00	127,693,747,581.00	103,87%
	2011	60,626,577,000.00	63,711,518,348.00	105,09%
	2012	68,092,071,000.00	68,250,687,455.00	100,23%
	2013	74,296,390,000.00	69,925,250,500.00	94,17%
	2014	78,489,524,000.00	79,473,180,663.00	101,25%
	2015	92,911,445,000.00	95,871,359,549.00	103,19%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2008	131,234,435,000.00	142,091,087,628.00	108,27%
	2009	154,009,077,000.00	153,889,361,350.00	99,92%
	2010	195,804,265,000.00	195,688,500,535.00	99,94%
	2011	212,158,060,000.00	211,976,158,779.00	99,91%
	2012	238,157,179,000.00	238,231,932,823.00	100,03%
	2013	263,267,935,000.00	263,267,978,393.00	100,00%

	2014	290,527,248,000.00	291,513,128,933.00	100,38%
	2015	320,425,076,000.00	320,604,409,928.00	100,06%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2008	172,844,654,000.00	501,613,179,620.00	290,21%
	2009	431,638,375,000.00	194,779,334,686.00	45,12%
	2010	504,677,977,000.00	200,794,757,707.00	39,79%
	2011	622,879,351,000.00	213,978,548,506.00	34,35%
	2012	709,655,045,000.00	146,964,123,680.00	20,71%
	2013	1,057,332,796,000.00	527,738,791,202.00	49,91%
	2014	909,362,031,000.00	380,739,898,487.00	41,87%
	2015	1,142,375,063,000.00	1,397,672,646,016.00	122,35%
Pendapatan Asli Daerah	2008	5,598,520,123,000.00	4,057,876,751,509.00	72,48%
	2009	3,658,340,173,000.00	3,716,052,663,294.00	101,58%
	2010	3,899,414,357,000.00	4,417,869,228,986.00	113,29%
	2011	5,158,663,988,000.00	5,088,713,212,530.00	98,64%
	2012	6,289,094,295,000.00	5,506,091,341,034.00	87,55%
	2013	7,411,086,681,000.00	7,590,459,482,078.00	102,42%
	2014	9,097,476,269,000.00	8,965,182,686,003.00	98,55%
	2015	12,068,029,759,000.00	10,904,825,812,504.00	90,36%

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah, 2016

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi Pajak Daerah pada Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan hal ini terlihat dari presentase capainnya dimana pada tahun 2008 – 2010 tingkat capain realisasi anggaran selalu meningkat bahkan melebihi apa yang dianggarkan, namun pada tahun 2011 - 2012 presentase capaian Pajak Daerah menurun masing masing 107,88% menjadi 106,02% dibandingkan tahun 2010 yang melebihi target yang dianggarkan yaitu sebesar 126,58%, kemudian pada tahun 2013 capaian Realisasi Pajak Daerah meningkat kembali menjadi 111,82% dan pada tahun 2014 dan 2015 capaian Realisasi Pajak Daerah menurun 105,04% menjadi 86,48%

Untuk capaian realisasi Retribusi Daerah tahun 2010 - 2011 capaian realisasi meningkat dari 103,87% menjadi 105,09% (melebihi anggaran yang ditargetkan), sedangkan capaian tahun 2008 - 2009 memperoleh capain realisasi anggaran menurun sebesar 101,18% menjadi 98,25% namun pada tahun 2011 capaian realisasi meningkat sebesar 105,09% tahun 2012 - 2013 capaian tersebut menurun lagi masing – masing 100,23% menjadi 94,17%, kemudian ditahun kedepannya yaitu tahun 2014 dan 2015 meningkat mencapai 101,25% menjadi 103,19%

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, tahun 2008 - 2009 capaian realisasi menurun dari 108,27% menjadi 99,92%, namun pada tahun 2010 meningkat dan tahun 2011 capaian tersebut menurun dari 99,94% menjadi 99,91% , untuk dua tahun kedepannya capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami peningkatan yang sama pada tahun 2012 yaitu 100,03% dan pada tahun 2013 menurun dari capian target anggaran sebesar

100,00% kemudian meningkat lagi di tahun 2014 sebesar 100,38% sedangkan ditahun 2015 terjadi penurunan persentasi menjadi 100,06%.

Pencapaian Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan sebesar 45,12%,39,79%,34,35% dan 20,71% berturut turut dikarenakan realisasi tidak bisa melampaui anggaran, namun di tahun 2013 dan 2015 target capaian mengalami peningkatan sebesar 49,91% dan 122,35% dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 41,87%.

Pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri data realisasi dari tahun 2008 – 2009 meningkat dalam pencapaiannya di lihat dari persentasenya dari 72,48% menjadi 101,58%, namun pada tahun 2010 Pendptan Asli Daerah mengalami peningkatan yang dari target yang di anggarakan sebesar 113,29% kemudian dari tahun 2011 - 2012 menurun sebesar 98,64% menjadi 87,55% kemudian tahun 2013 mengalami peningkatan persentase tsebesar 102,42% dan pada tahun 2014 dan 2015 pendapatan asli daerah mengalami penurunan persentasi 98,55% menjadi 90,36%

Dari penjelasan di atas adanya peningkatan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengidentifikasikan bahwa potensi pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang ada Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang dapat memberikan peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun sehingga pemanfaatannya dapat semakin dioptimalkan dan dikembangkan dan akan berdampak positif terhadap penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan alasan tersebut, maka menarik perhatian untuk diteliti dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH”** (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah).

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim: 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

- a. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah diatur bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b. Menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud pajak daerah :
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, diharapkan pajak daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjelaskan perbedaan antara jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota.

- a) Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak empat jenis yaitu :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman
Pajak Kabupaten/kota terdiri dari 7 jenis yaitu :
 1. pajak hotel
 2. pajak restoran
 3. pajak hiburan
 4. pajak reklame.
 5. pajak parkir
 6. pajak penerangan jalan
 7. pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C. .

Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu (Siahaan, 2013).

1. Retribusi Jasa Umum,
2. Retribusi Jasa Usaha,
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) bagian laba Perusahaan mliki Daerah,
- 2) bagian laba lembaga keuangan Bank,
- 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank,
- 4) bagaian laba atas penyertaan modal/investasi. Halim (2004:68),

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

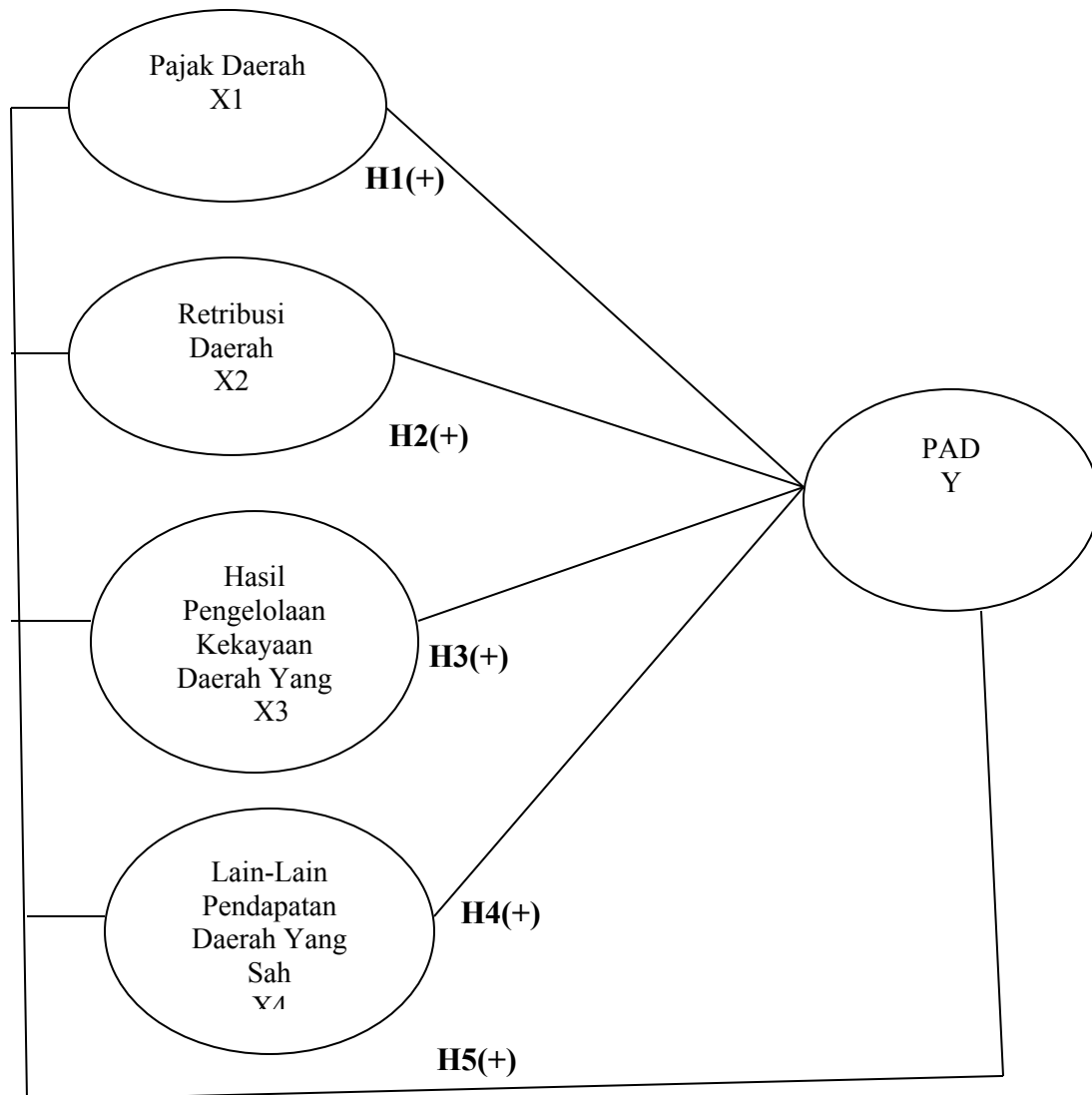
Pengertian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari hibah dan dana darurat. Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2004),

Kerangka Pikiran

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka secara skematis kerangka pemikiran dalam mengkaji Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2015. maka dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hubungan Antar Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

- H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
- H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
- H3 : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- H4 : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H5 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Berpengaruh Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian

a. Variabel Independen

Adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Variabel ini tidak tergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X4)

b. Variabel Dependen

Adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

Definisi Operasioanal

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4. Lain –Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Suharyadi dan Purwanto,(2009:7)

Sedangkan Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009:7) Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sampel dalam penelitian ini adalah data pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang dari tahun 2008 sampai 2015 jumlah bulan yaitu 96 bulan dari bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2015.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah merupakan data kuantitatif. Menurut Kurniawan (2009:7) Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif yang dikumpulkan berupa data pajak yang diambil dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah yang memberikan informasi berupa data.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi

Jawa Tengah di kota Semarang yaitu berupa penulis melakukan studi,pustaka,literatur dan.dokumen lainnya mengenai perpajakan khususnya pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan PAD di Provinsi Jawa Tengah di kota Semarang. Penelitian ini mengambil lokasi pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah yang beralamat jalan Pemuda no.1 Semarang Jawa Tengah, Indonesia.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan/data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait. Laporan-laporan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait.

Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Statistik Deskriptif

Menurut Yulius (2010:20) deskriptif berarti memberi gambaran. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan menyajikan data.

Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji tingkat kenormalan distribusi variabel pengganggu atau residual dalam model regresi. Adapun analisis yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah dengan metode grafik normal *probability plot*. Grafik normal *probability plot* berfungsi membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengandistribusi kumulatif dari distribusi normal(ghozali, 2007).

Menurut Wijaya (2012:132) Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF. Suatu variabel menunjukkan gejala multikolinieritas bisa dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang tinggi dari variabel-variabel bebas suatu model regresi

Menurut Wijaya (2012:125) Uji Multikolinieritas merupakan uji yang ditunjuk untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen).

c. Uji Autokorelasi

Menurut Wijaya (2012:127) Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ pada persamaan regresi linier. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya problem autokorelasi.

Regresi Linier Berganda

Untuk regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih, regresinya disebut juga regresi berganda. Oleh karena variabel independen diatas mempunyai variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi berganda.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: variabel independen adalah Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X_3) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X_4) terhadap variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

Untuk menguji hipotesis tersebut, maka rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Daerah

X_3 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

X_4 = Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

e = Standar error

Uji Hipotesis

Menurut Priyatno (2010:9) Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi).. Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara parsial/uji t dan pengujian secara simultan/uji f .

a. Uji t

Menurut Priyatno (2010:68) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y .

b. Uji F

Menurut Priyatno (2010:67) Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y .

c. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Priyatno (2010:66) Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) secara serentak terhadap variabel Y .

Analisis Data

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Uji Instrumen
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	96	2.11E11	1.31E12	4.6272E11	2.03371E11
RD	96	3.11E9	5.37E10	1.0224E10	8.20773E9
HPKDYG	96	-4.96E9	2.85E11	1.8933E10	5.39672E10
LLPDYS	96	5.67E9	3.28E11	3.7128E10	5.07383E10
PAD	96	537.00	1.45E12	5.2341E11	2.35636E11
Valid N (listwise)	96				

Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016

Data primer menjelaskan bahwa pada variabel pajak daerah minimum sebesar Rp 211,000,000,000.00 dan maksimum sebesar Rp 1,310,000,000,000.00 dengan rata-rata Rp 462,720,000,000.00 dan standar deviasi sebesar Rp 203,371,000,000.00 Pada variable retribusi daerah minimum sebesar Rp 3,110,000,000.00 dan maksimum sebesar Rp 53,700,000,000.00 dengan rata-rata Rp 10,224,000,000.00 dan standar deviasi sebesar Rp 8,207,730,000.00 Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan minimum sebesar Rp -4,960,000,000.00 dan maksimum sebesar Rp 285,000,000,000.00 dengan rata-rata Rp 18,933,000,000.00 dan standar deviasi sebesar Rp 53,967,200,000.00 Variable Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah minimum sebesar Rp 5,670,000,000.00 dan maksimum sebesar Rp 328,000,000,000.00 dengan rata-rata Rp 37,128,000,000.00 dan standar deviasi sebesar Rp 50,738,300,000.00 dan Variabel Pendapatan Asli Daerah minimum sebesar Rp 537.00 maksimum sebesar Rp 1,450,000,000,000.00 dengan rata – rata Rp 523,410,000,000.00 dan standar deviasi sebesar Rp 235,636,000,000.00.

Hasil Uji Asumsi Klasik

A. Hasil Uji Multikolinearitas

Menurut Wijaya (2012:125) Uji Multikolinieritas merupakan uji yang ditunjuk untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen).

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3.885E9	1.999E10		-.194	.846		
PD	.988	.033	.853	29.796	.000	.725	1.380
RD	1.065	.771	.037	1.381	.171	.822	1.217
HPKDYS	1.037	.107	.238	9.718	.000	.993	1.007
LLPDYS	1.069	.122	.230	8.769	.000	.862	1.161

Sumber : Hasil Olahan Penulis,2016

Berdasarkan dari hasil perhitungan nilai seluruh variabel independen nilai tolerance > 0,1 dan (Varian Inflation Factor) VIF < 10, maka dapat disimpulkan penelitian ini bebas masalah multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2011).

B. Hasil Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi linier. Menurut Ghozali (2006:124) Jika Dw hitung > du, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual.

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.973 ^a	.946	.944	5.59365E10	2.041

a. Predictors: (Constant), LLPDYS, HPKDYS, RD, PD

b. Dependent Variable: PAD

Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016

Dari hasil uji autokorelasi, berdasarkan nilai α dengan nilai d table dl (n=96, k=3) = 1,6039, du (n=96, k=3) = 1,7326. Nilai dw (2,041) > du (1,7326), dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual.

Regresi Linier Berganda

Setelah dilakukan analisis regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16,0 untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3.885E9	1.999E10		-.194	.846		
PD	.988	.033	.853	29.796	.000	.725	1.380
RD	1.065	.771	.037	1.381	.171	.822	1.217
HPKDYY	1.037	.107	.238	9.718	.000	.993	1.007
LLPDYS	1.069	.122	.230	8.769	.000	.862	1.161

a. Dependent Variable: PAD

Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Olahan Penulis,2016

Berdasarkan tabel 4.6, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

X3 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

X4 = Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

e = Error

$$Y = -3,885E9 + 0,988 X1 + 1,065 X2 + 1,037 X3 + 1,069 X4 + e$$

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta = -3,885E9

Nilai konstanta negative menunjukkan pengaruh negative variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah).Bila variabel independent turun atau tidak berpengaruh dalam satu satuan,maka variabel PAD akan turun atau tidak terpenuhi. 2. Pajak Daerah (X1) = 0,988

Merupakan nilai koefisien regresi variabel pajak daerah (X1) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) artinya jika pajak daerah (X1) mengalami kenaikan satu satuan, maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,988 atau 98,8% koefisien bernilai positif artinya antara pajak daerah (X1) dan pendapatan asli daerah (Y) hubungan positif.Kenaikan pajak daerah (X1) akan mengakibatkan kenaikan pada pendapatan asli daerah(Y).

3. Retribui Daerah (X2) = 1,065

Merupakan nilai koefisien regresi variabel retribusi daerah (X2) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) artinya jika retribusi daerah (X2) mengalami kenaikan satu satuan, maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,065 atau 106,5% koefisien bernilai positif artinya antara retribusi (X2) dan pendapatan asli daerah (Y) hubungan positif. Kenaikan retribusi daerah (X2) akan mengakibatkan kenaikan pada pendapatan asli daerah (Y).

4. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) = 1,037

Merupakan nilai koefisien regresi variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) artinya jika hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) mengalami kenaikan satu satuan, maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,037 atau 103,7% koefisien bernilai positif artinya antara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) dan pendapatan asli daerah (Y) hubungan positif. Kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) akan mengakibatkan kenaikan pada pendapatan asli daerah (Y).

5. lain-lain pendapatan daerah yang sah (X4) = 1,069

Merupakan nilai koefisien regresi variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah (X4) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) artinya jika lain-lain pendapatan daerah yang sah (X4) mengalami kenaikan satu satuan, maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,069 atau 106,9% koefisien bernilai positif artinya antara lain-lain pendapatan daerah yang sah (X4) dan pendapatan asli daerah (Y) hubungan positif. Kenaikan lain-lain pendapatan daerah yang sah (X4) akan mengakibatkan kenaikan pada pendapatan asli daerah (Y).

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu:

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh yang berarti (signifikan) antara variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah) secara parsial terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Hasil uji parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan SPSS 16.0 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3.885E9	1.999E10		-.194	.846		
PD	.988	.033	.853	29.796	.000	.725	1.380

RD	1.065	.771	.037	1.381	.171	.822	1.217
HPKDYYD	1.037	.107	.238	9.718	.000	.993	1.007
LLPDYS	1.069	.122	.230	8.769	.000	.862	1.161

a. Dependent Variable: PAD

Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Olahan Penulis,2016

Berikut ini adalah hasil uji parsial (Uji t) pada tabel diatas :

1.H1: Pajak Daerah (X1) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2015.

Dari tabel 4.7 menunjukkan nilai signifikansi dan t-hitung masing-masing variabel. Pajak Daerah memiliki nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$. Dari nilai t-hitung $29,796 >$ dari t-tabel 1,66123, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015.

2.H2: Retribusi Daerah (X2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2015

Retribusi Daerah memiliki nilai Sig sebesar $0,171 > 0,05$. Dari nilai t-hitung $1,381 <$ dari t-tabel 1,66123, maka H_2 diterima dan H_0 diterima yang berarti Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015.

3.H3: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2015

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memiliki nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$. Dari nilai t-hitung $9,718 >$ dari t-tabel 1,66123, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima yang berarti Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015.

4.H4: Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X4) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2015

Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$. Dari nilai t-hitung $8,769 >$ dari t-tabel 1,66123, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima yang berarti Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015.

Hasil Uji F

Pengujian variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah) terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah). Uji F digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H5:Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X4)Berpengaruh positif secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015.

Tabel 4.6

Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.990E24	4	1.248E24	398.710	.000 ^a
Residual	2.847E23	91	3.129E21		
Total	5.275E24	95			

Sumber : Data Sekunder diolah,2016

Dari tabel 4.8 nilai Sig sebesar 0,000, maka $0,000 < 0,05$. Dari nilai F-hitung 398,710 lebih besar dari F-tabel 2,47, maka H4 diterima dan Ho ditolak yang berarti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Menurut Priyatno (2010:66) Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2,... Xn) secara serentak terhadap variabel Y.

Tabel 4.7

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.973 ^a	.946	.944	5.59365E10

a. Predictors: (Constant), LLPDYS, HPKDYD, RD, PD

b. Dependent Variable: PAD

Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,944 atau 94,4% berarti bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 94,4% oleh variabel Pajak Daerah , Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, analisa data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015.
2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015.
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015.
5. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015.
6. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,944 atau 94,4% berarti bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 94,4% oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang diteliti hanya terbatas pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan kemudian jumlah sampel yang diteliti hanya terbatas pada 8 (delapan) tahun terakhir. Sehingga hasil yang diperoleh dalam penelitian ini belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi pada penelitian selanjutnya.

Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara lebih menggali sumber-sumber penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan melaksanakan intensifikasi, seperti : pendataan ulang wajib pajak dan retribusi untuk mendapatkan data potensi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang lebih akurat, meningkatkan koordinasi dengan dinas atau instansi yang terkait dengan jenis pungutan sesuai kewenangannya agar menghindari kebocoran penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta meningkatkan pengawasan secara berkala dan tidak mendadak guna memperbaiki proses pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang lebih bersih dan transparan.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, baik dari segi jumlah sampel yang hanya meliputi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun penelitian yang terbatas hanya 8 tahun serta pembatasan mengenai pendapatan asli daerah yang berfokus pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Serta penambahan periode waktu penelitian lebih dari 8 tahun guna mengetahui tingkat peningkatan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4:Jakarta
- DPPAD Prov Jateng; *Profil DPPAD Provinsi Jawa Tengah*; Semarang; Kantor Pusat DPPAD Prov Jateng; 2016.
- DPPAD Prov Jateng; *Rekapitulasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*; Semarang; Kantor Pusat DPPAD Prov Jateng; 2016.
- DPPAD Prov Jateng; *Target dan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*; Semarang; Kantor Pusat DPPAD Prov Jateng; 2016.
- DPPAD Prov Jateng; *Himpunan Laporan Struktural Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2015*; Semarang ; Kantor Pusat DPPAD Prov Jateng; 2016.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah*. UPP-AMP Yogyakarta: YKPN
- Halim, Abdul., 2004, *Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN Bunga Rampal.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta
- Nanik Wahyuni., 2010, *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang* : Jurnal Akuntansi FE UIN Maliki Malang
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*. Jakarta: MediaKom.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di*

Indonesia. Skripsi Sarjana (dipublikasikan).Fakultas Ekonomi UII:
Yogyakarta.

- Pemerintah No. 25 Tahun 2000. Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah
- Siahaan, P Marihot. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suharyadi dan Purwanto. 2009. *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang No. 28. Tahun 2007.Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo, B., Ilyas, Wirawan. 2005. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Yulius, Oscar. 2010. *Kompas IT Kreatif SPSS 18*. Yogyakarta: Panser Pustaka.